

PENGARUH PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Andi Afrizal
Manajenem, Universitas Pasir Pengaraian

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 12 Januari
2019
Disetujui 15 Maret 2019
Dipublikasikan
15 Juni 2019

Keywords: SIMDA,
Kualitas Laporan
Keuangan, Rokan Hulu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaruh penerapan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Sampel dalam penelitian ini adalah 43 orang pengguna aplikasi SIMDA. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan antara independen (Aplikasi SIMDA) secara parsial terhadap variabel dependen (Kualitas Laporan Keuangan).

THE INFLUENCE OF APPLICATION OF REGIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (SIMDA) APPLICATION ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS ON THE WORKING UNIT OF THE REGIONAL DEVELOPMENT (SKPD) OF ROKAN HULU REGENCY

Abstract

This study aims to determine how the influence of the application of the regional management information system (SIMDA) to the financial statements of the regional work unit (SKPD) of the Government of Rokan Hulu Regency. The sample in this study were 43 SIMDA application users. The method used is quantitative analysis. The results of the study there is a significant influence between independent (SIMDA application) partially on the dependent variable (Quality of Financial Statements).

PENDAHULUAN

Salah satu penerapan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung proses pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel maka Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah memfasilitasi pemerintah dengan aplikasi SIMDA dengan harapan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabilitas dan transparan. SIMDA merupakan paket terintegrasi dari pemerintah daerah. Untuk mempercepat penyusunan APBD, pelaksanaannya dan penyusunan laporan keuangan. Dalam setiap pemeriksaan keuangan yang dilakukan, BPK mengeluarkan pernyataan atau kesimpulan yang disebut opini. Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada kriteria antara lain :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Interen.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified opinion*) yaitu Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified opinion*) Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal

memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan pemeriksa atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

3. Tidak Wajar (*TW/Adverse opinion*) Opini TW diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.
4. Tidak Memberikan Pendapat (*TMP/Disclaimer opinion*) Adapun opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini pemeriksa karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga pemeriksa tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian, pemeriksa tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, pemeriksa tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini, pemeriksa tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.

Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Tabel. 1.1
Data Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Rokan Hulu

No	Tahun	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
1	2011	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011.
2	2012	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Rokan Hulu TA 2012.
3	2013	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP – DPP) atas LKPD Kabupaten Rokan Hulu TA 2013.
4	2014	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2014.
5	2015	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Rokan Hulu TA 2015.

Sumber : Kasubag Humas dan TU BPK Perwakilan Provinsi Riau

Dari keterangan-keterangan yang sudah diuraikan di atas, maka dalam rangka untuk memahami permasalahan yang terkait dengan masalah hasil laporan keuangan Kabupaten Rokan Hulu dan Sistem informasi di daerah kabupaten Rokan Hulu, maka penulis melakukan Penelitian terhadap sistem informasi manajemen keuangan bagi pemerintah daerah. Kemudian penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan manajemen keuangan yang telah dilakukan selama ini dengan mengambil judul, *“Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu “*.

METODE

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2012:122). Adapun pertimbangan sampel yang akan digunakan yaitu 1 (satu) orang dari setiap SKPD di Kabupaten Rokan Hulu dari bidang keuangan per SKPD yang mengetahui dan memahami tentang penggunaan SIMDA dalam pengelolaan laporan keuangan dalam hal ini ditetapkan yang mengetahui dan memahami adalah bendahara keuangan dari setiap SKPD di Kabupaten Rokan Hulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penyebaran kuisioner kepada responden menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan yang positif terhadap pernyataan yang penulis ajukan yang berkaitan tentang pengaruh penerapan aplikasi sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten rokan hulu.

Seperti pada variabel X aplikasi simda bahwa dari tanggapan responden membuktikan bahwa Tanggapan Responden terhadap Pernyataan 1 sampai 5 memberikan penilaian yang setuju yaitu sebesar 155

tanggapan responden, 13 tanggapan responden mengatakan Ragu-ragu, dan 41 tanggapan responden mengatakan sangat setuju, 3 tanggapan responden tidak setuju dan 3 tanggapan kurang setuju.

Sedangkan variabel Y kualitas Laporan Keuangan dengan jumlah pernyataan 1 sampai 6 menunjukkan bahwa yang menyatakan setuju dari hasil tanggapan responden mengatakan bahwa 183 tanggapan responden mengatakan setuju, 25 tanggapan responden mengatakan ragu-ragu, 0 tanggapan responden mengatakan kurang setuju, 3 tanggapan tidak setuju dan 47 tanggapan responden mengatakan sangat setuju.

Dengan demikian secara umum bahwa pengaruh penerapan aplikasi simda terhadap kualitas laporan keuangan memberikan hasil yang sangat baik dari hasil tanggapan yang diberikan oleh responden yang rata-rata mengatakan setuju terhadap penerapan aplikasi simda terhadap kualitas laporan keuangan.

Bersarkan hasil perhitungan metode penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diketahui bahwa persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut : $Y=8,604+0,699X$ artinya konstanta nilai a menyatakan bahwa adalah tetap sebesar 8,604. Sedangkan konstanta Nilai b 0,699 bernilai positif menyatakan bahwa setiap ada penambahan atau peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 69,9 %.

Nilai R menunjukkan angka koefisien korelasi sebesar 0,757 hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel aplikasi simda terhadap kualitas laporan keuangan adalah Kuat. R Square juga disebut sebagai koefisien determinasi hal ini berarti bahwa pengaruh penerapan aplikasi SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah kabupaten Rokan Hulu berpengaruh sebesar 57,4% dan 42,6 % dipengaruhi oleh sebab-sebab lainnya.

Bahwa nilai t-hitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai t-tabel atau $0,699 \leq$

1,682 dengan nilai sig lebih kecil dari nilai propabilitas atau $0,000 < 0,05$ ini berarti bahwa H_0 ditolak. Jadi ada pengaruh signifikan antara variabel independen (aplikasi SIMDA) secara parsial terhadap variabel dependen (Kualitas Laporan Keuangan).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yang secara singkat disajikan sebagai berikut :

Pengaruh penerapan aplikasi SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah di pemerintah kabupaten Rokan Hulu mendapat kan hasil setuju dari hasil tanggapan responden yang berjumlah 155 atau 72,09% dan 183 atau 70,93%. Kemudian dari hasil persamaan regresi linier sederhana yang didapatkan adalah sebagai berikut : $Y=8,604+0,699X$ artinya konstanta nilai a menyatakan bahwa adalah tetap sebesar 8,604. Sedangkan konstanta Nilai b 0,699 bernilai positif menyatakan bahwa setiap ada penambahan atau peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 69,9 %. Nilai R menunjukkan angka koefisien korelasi sebesar 0,757 hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel aplikasi simda terhadap kualitas laporan keuangan adalah Kuat.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang disesuaikan dengan kesimpulan maka dapat disarankan kepada :

Kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan aplikasi SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dilihat dari hasil tanggapan responden yang rata-rata menyatakan setuju terhadap penerapan aplikasi SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan maka dengan menggunakan

aplikasi simda dapat mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mendapatkan kategori wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diterbitkan dalam undang-undang nomor 15 tahun 2004 oleh Badan Pemeriksaan keuangan (BPK). Penelitian ini hanya terbatas pada 1 (satu) orang dari setiap SKPD di Kabupaten Rokan Hulu dengan Menetapkan responden hanya Bendahara dari setiap SKPD di Kabupaten Rokan Hulu sehingga masih banyak objek lain yang bisa diteliti. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan bisa mengembangkan penelitian kepada objek dengan sampel yang lebih signifikan dan menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi penerapan aplikasi SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, halim. 2007. Akuntansi sektor publik akuntansi Keuangan daerah. Edisi revisi. Jakarta:salemba empat.
- Elim. Ingraiani. 2015 evaluasi penerapan sistem informasi Manajemen daerah (simda) keuangan pada dppka Kabupaten kepulauan sanghie jurnal emba, vol. 3, no .2, juni 2015, hal .114-122, diakses oktober, 2016.
- Mcleod, raymond dan schell, geogre p. 2009. Sistem Informasi manajemen. Jakarta:salemba empat.
- Nugraha. Adi harmadhani.2013 analisis penerapan sistem Informasi manajemen keuangan daerah (simda keuangan) dalam pengolahan data keuangan pada organisasi pemerintah daerah (studi kasus pada dinas kesehatan kabupaten nganjuk) jurnal akuntansi aktual,vol. 2, nomor 1,januari 2013, hlm.25-33, diakses maret 2016.
- Peraturan daerah kabupaten rokan hulu nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
- Peraturan pemerintah no. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah.
- Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan.
- Riduwan. 2013. Dasar- dasar statistik. Bandung: albeta.
- Satgas pengembangan simda 2008. Simda dan Penerapannya. Jakarta: badan pemeriksa keuangan dan pembangunan.www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/pengenalan-sistem-informasi-manajemen-daerah-simda.bpkp. Diakses oktober 2016.
- Satgas pengembangan simda. 2011. Sejarah simda. Jakarta: badan pemeriksa keuangan dan pembangunan.www.bpkp.go.id/sakd/konten/334/serah-simda.bpkp.diakses oktober ,2016.
- Siagian, sondang p.2014. Sistem informasi manajemen. Jakarta: bumi aksara
- Siregar, syofian. 2015. Statistik parametrik untuk Penelitian kuantitatif dilengkapi dengan perhitungan manual dan aplikasi spss versi 17. Jakarta:bumi aksara.
- Sugiyono. 2012. Metode penelitian bisnis. Bandung : cv. Alfabeta.
- Susanta, Edhy. 2003. Sistem Informasi Manajemen .Graha Ilmu.Yogyakarta.
- Tegela. Ririn. 2014 Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, Vol. 2, No 1 (2014), Diakses Februari 2017.